

ABSTRAK

Chandra Firmansyah, *Rekrutmen Calon Kepala Daerah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat*

Pemilihan kepala daerah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui mekanisme rekrutmen yang ditetapkan oleh partai sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaannya. Hal ini tertuang dalam ketentuan yang dikeluarkan DPP PPP mengenai tahapan-tahapan rekrutmen calon kepala daerah yang bertujuan untuk mencari sosok pemimpin daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan tahapan-tahapan rekrutmen calon kepala daerah, mengetahui pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kepala daerah, serta mengetahui relevansi Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dan mekanisme rekrutmen yang dilaksanakan DPW PPP Provinsi Jawa barat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari pemikiran Islam yang menjunjung tinggi martabat seorang pemimpin, dimana Islam mengharuskan untuk memilih seorang pemimpin ditengah masyarakat yang mampu mengatur, mengelola, dan menjalankan roda pemerintahan untuk tercapainya kemaslahatan umat.

Penelitian ini menggunakan metode *studi kasus*, dimana penulis mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan prosedur pengumpulan informasi untuk mendeskripsikan tentang rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan di DPW PPP Provinsi Jawa Barat sebagai suatu analisis terhadap kasus yang terjadi.

Dari informasi yang telah didapat, mekanisme atau tahapan-tahapan rekrutmen calon kepala daerah di DPW PPP Provinsi Jawa Barat diawali dengan tahapan rekrutmen atau proses penjangkaran, tahapan survei dan penelitian, tahapan uji kelayakan dan kepatutan, tahapan penetapan pasangan bakal calon, tahapan pembuatan nota kesepakatan dan fakta integritas, dan terakhir tahapan suksesi dan kemenangan bakal calon. Dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon dilaksanakan secara kondisional dan bergantung pada kebijakan partai yang diambil oleh *ex officio* dan ketua tim kemenangan pemilu dalam dialog internal partai. Relevansi Siyasah Dusturiyah dapat dilihat dari proses pengangkatan pemimpin pada masa khulafatur rasyidin yang sama-sama melaksanakan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, yaitu prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*), prinsip musyawarah (*al-syu'ra'*), prinsip persamaan (*al-musa'wah*), dan prinsip keadilan (*al-'adl*).